



Membangun Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Peran Kompetensi, Komitmen, dan Pengawasan

Enhancing Transparency in Village Finance Management: The Roles of Competence, Commitment, and Oversight

Syamsul*¹, Nurlailah², Nurhadi³

¹²³Universitas Abdul Azis Lamadjido, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jl. Dr. Suharso No. 36 A, Besusu Barat, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah
Email: *syamsulsyahrir@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 16 Januari 2026

Accepted: 17 Juni 2026

Published: 20 Juni 2026

Keywords: *transparency; village financial; competence; commitment; oversight*

DOI: 10.37859/jae.v16i1.10987

JELClassification: M41, M48

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kompetensi pendamping desa, komitmen pemerintah desa, dan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksplanatori. Penelitian ini dilakukan pada desa-desa di Kabupaten Donggala. Data diperoleh melalui survei kepada pemerintah desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat. Kemudian, dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi pendamping desa, komitmen pemerintah desa, dan pengawasan BPD masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas pendamping, konsistensi komitmen pemerintah desa, serta efektivitas fungsi pengawasan BPD untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan mengurangi asimetri informasi dalam pengelolaan keuangan desa.

This study aims to analyze the effects of village facilitator competence, village government commitment, and oversight by the Village Consultative Body (BPD) on the transparency of village financial management. Employing an explanatory quantitative design, the research was conducted in villages in Donggala Regency. Data were collected through a survey of village government officials, BPD members, and community leaders, and subsequently analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). The results indicate that village facilitator competence, village government commitment, and BPD oversight each have a positive and significant effect on the transparency of village financial management. These findings underscore the importance of strengthening the capacity of village facilitators, ensuring the consistency of village government commitment, and enhancing the effectiveness of the BPD's oversight function in promoting information transparency and reducing information asymmetry in village financial management.

PENDAHULUAN

Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa mendapatkan mandat untuk mengelola keuangan desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap tahunnya, alokasi anggaran terus meningkat, sehingga menjadikan desa sebagai entitas strategis dalam tata kelola keuangan publik (Sofyani & Tahar, 2021). Namun, kondisi ini juga membawa kerentanan baru berupa penyalahgunaan, maladministrasi, dan korupsi (Syamsul et al., 2024). Laporan Indonesia Corruption Watch mencatat ratusan perkara korupsi dana desa dalam lima tahun terakhir (Aji, 2023), yang menunjukkan lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada tingkat pemerintahan desa (Syamsul et al., 2025; Putri & Sari, 2024).

Transparansi keuangan merupakan prasyarat utama terwujudnya *good governance* (Lapsley and Ryos, 2015), karena membuka akses informasi publik dan memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan keuangan desa. Pemanfaatan teknologi informasi terbukti mampu mendorong akurasi, efisiensi, transparansi, serta terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (Pribadi et al., 2025; Susanti et al., 2022). Kendati demikian, teknologi tidak akan berjalan efektif jika tidak disertai dukungan dari faktor kelembagaan dan sumber daya manusia (Bertot et al., 2012; Halachmi & Greiling, 2013). Dalam konteks ini, kompetensi pendamping desa, komitmen pemerintah desa, dan efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan penentu bagi terwujudnya tata kelola keuangan desa (Apriliana, 2019; Purnamawati & Adnyani, 2019).

Hasil studi Sofyani et al. (2021) menginformasikan bahwa komitmen organisasi tidak berdampak signifikan terhadap transparansi keuangan desa, sementara Basri et al. (2021) membuktikan adanya pengaruh positif yang signifikan terhadap *good governance*. Mukarramah (2024) Melaporkan bahwa kompetensi aparatur tidak berdampak pada akuntabilitas keuangan desa. Lain halnya, Dewi et al. (2021) mengindikasikan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan kompetensi terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Nislandi & Munari (2023) serta Amaliya & Maryono (2020), juga menunjukkan hasil yang serupa, yang menekankan bahwa pentingnya kompetensi, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat. Studi lain menambahkan bahwa perilaku prososial (Diansari, et al., 2023; Savitri et al., 2023), maupun pengawasan BPD (Kusrini & Jaya, 2024), turut berperan dalam mendorong transparansi, meskipun hasilnya belum sepenuhnya konsisten. Penelitian tersebut secara umum menunjukkan adanya variasi hasil terkait faktor-faktor yang memengaruhi transparansi pengelolaan keuangan desa.

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, hasil kajian yang menempatkan kompetensi pendamping desa, komitmen pemerintah desa, dan pengawasan BPD sebagai faktor penentu transparansi pengelolaan keuangan desa masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menguji kembali pengaruh ketiga variabel tersebut dalam satu kerangka konseptual untuk menjelaskan transparansi pengelolaan keuangan desa. Selain menutup celah kajian yang ada, studi ini juga diharapkan memberikan sumbangsih praktis bagi pemerintah (pusat, daerah, dan desa) untuk menyusun kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih terbuka, memperkuat fungsi pengawasan kelembagaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa di Indonesia, utamanya pada desa-desa di Kabupaten Donggala.

Teori Keagenan

Teori agensi menguraikan relasi antara prinsipal, yaitu masyarakat, dan agen, yaitu pemerintah desa, dalam pengelolaan sumber daya publik (Jensen & Meckling, 1976). Konflik kepentingan sering muncul karena asimetri informasi, di mana pemerintah desa memiliki informasi lebih dibandingkan dengan masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan *moral hazard*. Mekanisme pengawasan eksternal oleh BPD dan internal melalui komitmen aparatur desa serta peran pendamping desa diperlukan untuk meminimalisasi risiko penyalahgunaan keuangan desa. Transparansi menjadi salah satu cara untuk mengurangi *information gap* antara *agent* dan *principal* (Laswad et al., 2005).

Good Governance

Konsep *good governance* dilandaskan pada asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan efektivitas dalam kelola sektor publik (UNDP, 1997). Transparansi dianggap sebagai salah satu prinsip fundamental, karena memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang relevan mengenai proses pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya, serta hasil kinerja pemerintah (Fox, 2007). Transparansi pengelolaan keuangan desa merupakan

instrumen untuk mencegah korupsi, mendorong akuntabilitas, dan mempromosikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa (Nurhadi et al., 2021; Nurlailah & Syamsul, 2021).

Kompetensi Pendamping Desa dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, kemampuan teknis, dan perilaku kerja yang mendukung seseorang dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif (Spencer & Spencer, 1993). Kompetensi dalam konteks pendamping desa, meliputi kemampuan teknis, manajerial, dan sosial untuk memfasilitasi pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan (Purnamawati & Adnyani, 2019). Umar et al. (2018) Menyatakan bahwa pentingnya penguatan kompetensi SDM desa untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana desa dan laporan keuangan. Pendamping desa berperan strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai regulasi (Syamsul et al., 2024). Artinya, kompetensi pendamping desa yang memadai dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memperkuat transparansi. Jatmiko & Setiawan (2020) Informasikan bahwa komitmen manajemen berdampak positif terhadap transparansi laporan keuangan. Hulu & Rahim (2022) Menandakan adanya pengaruh kompetensi aparatur terhadap pengelolaan dana desa. Apabila kemampuan perangkat desa meningkat, maka pengelolaan keuangan desa cenderung lebih transparan serta akuntabel. Sementara itu, Dilla & Coryanata (2024) mengindikasikan bahwa kompetensi pendamping desa dan aparatur desa berdampak terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kompetensi pendamping desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa.

Komitmen Pemerintah Desa dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Komitmen pemerintah desa didefinisikan sebagai bentuk kesungguhan aparatur desa, terutama kepala desa dan perangkatnya yang merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi tata kelola keuangan desa. Komitmen pemerintah desa yang kuat meningkatkan kinerja dan penerapan tata kelola yang baik. Kepala desa yang berkomitmen akan mendorong praktik transparansi dengan menyediakan akses informasi kepada masyarakat dan menyajikan laporan secara terbuka. Sriwahyuni et al. (2020) Menyampaikan bahwa diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemimpin untuk meningkatkan transparansi pemerintah daerah. Komitmen ini tercermin pada kesediaan untuk mengelola keuangan secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Diansari et al. (2023) Menekankan bahwa aspek perilaku dan kelembagaan memegang peran penting dalam mendorong transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan itu, studi Ahyaruddin & Akbar (2017) menunjukkan bahwa komitmen pimpinan pada organisasi publik berhubungan positif dengan keterbukaan informasi dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Sehingga, hipotesis ini diajukan sebagai berikut:

H2: Komitmen pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa.

Pengawasan BPD dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

BPD adalah lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengawasan keuangan desa (Republik Indonesia, 2016). Pengawasan yang dilakukan BPD berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal dalam menekan ketimpangan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Pengawasan yang efektif oleh BPD berfungsi sebagai *check and balance* terhadap pemerintah desa, memastikan alokasi anggaran sesuai perencanaan, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi (Baskoro, 2025). Senada dengan itu, Basri et al. (2021) menerangkan bahwa fungsi pengawasan, penampung aspirasi, dan legislasi BPD menciptakan *checks and balances* yang mendukung *good governance*. Semakin optimal fungsi pengawasan yang dijalankan BPD, semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan desa (Kusrini & Jaya, 2024). Di sisi lain, lemahnya pengawasan terbukti berkontribusi terhadap maraknya penyimpangan dalam penggunaan dana desa (Baskoro, 2025). Apriliana (2019) menunjukkan bahwa pengawasan lembaga perwakilan desa memiliki pengaruh positif terhadap transparansi keuangan desa. Senada dengan temuan tersebut, hipotesis penelitian ini diajukan:

H3: Pengawasan BPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif eksplanatori. Populasi penelitian terdiri atas 158 desa di Kabupaten Donggala, dengan 40 desa ditetapkan sebagai sampel berdasarkan

pertimbangan keterwakilan wilayah administratif dan kemudahan akses penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui survei terhadap 240 responden yang terdiri atas dua aparat pemerintah desa, dua anggota BPD, dan dua tokoh masyarakat pada setiap desa. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu masing-masing responden yang dipilih berdasarkan keterlibatan, fungsi, dan pengetahuannya mengenai pengelolaan keuangan desa. Aparatur pemerintah desa merepresentasikan pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan, anggota BPD merepresentasikan fungsi pengawasan kelembagaan, sedangkan tokoh masyarakat merepresentasikan perspektif masyarakat dalam partisipasi dan pengawasan sosial. Dengan karakteristik tersebut, seluruh responden dinilai memiliki pemahaman yang memadai mengenai konteks pengelolaan keuangan desa sehingga mampu memberikan penilaian terhadap variabel yang diteliti. Oleh karena itu, data dianalisis pada tingkat individu dan tidak diagregasi pada tingkat desa.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan kuesioner terstruktur berbasis skala *Likert* lima poin, mulai dari nilai 1 untuk jawaban sangat tidak setuju hingga nilai 5 untuk jawaban sangat setuju. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya, kompetensi pendamping desa (Diansari et al., 2023), komitmen pemerintah desa (Sofyani et al., 2021), pengawasan BPD (Maharani, 2018), serta transparansi pengelolaan keuangan desa (Sofyani et al., 2021). Data dianalisis dengan teknik analisis *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Squares* (SEM-PLS). Proses analisis dilakukan dalam dua tahap, yaitu pengujian model pengukuran (*outer model*) untuk menilai validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, serta pengujian model struktural (*inner model*) guna mengetahui hubungan antarvariabel laten melalui nilai *path coefficient* dan *R-square*. Selanjutnya, tingkat signifikansi diuji menggunakan metode *bootstrapping*. Pemilihan SEM-PLS didasarkan pada kemampuannya dalam mengakomodasi data yang tidak berdistribusi normal, dan dapat diterapkan pada jumlah sampel yang relatif terbatas, serta fleksibel untuk menganalisis model dengan variabel laten yang bersifat multidimensi (Hair et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Hasil pengumpulan data yang tersaji pada Tabel 1 menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih mendominasi dengan persentase 83 persen dibandingkan dengan responden perempuan yang hanya 17 persen. Selanjutnya, berdasarkan jabatan, distribusi responden seimbang antara aparat pemerintah desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat, yang masing-masing berjumlah 33 persen.

Tabel 1. Profil Responden

No.	Profil	Jumlah	Persentase	
1	Gender	Laki-laki	198	0.83
		Perempuan	42	0.18
2	Jabatan	Pemerintah Desa	80	0.33
		BPD	80	0.33
		Tokoh Masyarakat	80	0.33
3	Umur	< 20 tahun	0	0.00
		21–30 tahun	31	0.13
		31–40 tahun	52	0.22
		41–50 tahun	69	0.29
		≥ 51 tahun	88	0.37
Total		240	1.00	

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan kelompok usia, proporsi terbesar responden berada pada rentang usia di atas 40 tahun, dengan rincian 37 persen berusia ≥ 51 tahun dan 29 persen berusia 41–50 tahun. Kondisi ini menjelaskan bahwa secara umum responden memiliki kedewasaan dan pengalaman sosial yang cukup, sehingga dapat memberikan penilaian yang lebih objektif terkait pengelolaan keuangan desa.

Hasil Pengujian *Outer Model*

Hasil evaluasi *outer model* pada Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki nilai *loading factor* di atas 0,70. Namun, indikator KPMD1 dan KPMD4 pada variabel komitmen pemerintah desa dieliminasi karena memiliki nilai *loading factor* di bawah 0,50. Setelah penghapusan tersebut, seluruh konstruk memenuhi validitas konvergen yang ditunjukkan oleh nilai *Average Variance Extracted* (AVE) di atas 0,50 (Hair et al., 2014). Meskipun masih terdapat beberapa

indikator dengan nilai *loading factor* antara 0,50-0,70, indikator tersebut tetap dipertahankan karena konstruk terkait telah memenuhi kriteria AVE dan reliabilitas, sehingga masih dianggap mampu merepresentasikan konstruk yang diukur (Hair et al., 2014).

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Konvergen

Konstruk	Item	Loading	AVE	P-value
Kompetensi Pendamping Desa (KPED)	KPED1	0.761	0.510	<0.001
	KPED2	0.717		<0.001
	KPED3	0.686		<0.001
	KPED4	0.740		<0.001
	KPED5	0.670		<0.001
	KPED6	0.705		<0.001
Komitmen Pemerintah Desa (KPMDD)	KPMDD2	0.720	0.515	<0.001
	KPMDD3	0.817		<0.001
	KPMDD5	0.726		<0.001
	KPMDD6	0.590		<0.001
Pengawasan BPD (PBPD)	PBPD1	0.762	0.551	<0.001
	PBPD2	0.741		<0.001
	PBPD3	0.758		<0.001
	PBPD4	0.785		<0.001
	PBPD5	0.647		<0.001
	PBPD6	0.790		<0.001
	PBPD7	0.701		<0.001
Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (TPKD)	TPKD1	0.709	0.516	<0.001
	TPKD2	0.755		<0.001
	TPKD3	0.784		<0.001
	TPKD4	0.557		<0.001
	TPKD5	0.727		<0.001
	TPKD6	0.753		<0.001

Sumber: Data diolah (2025)

Selanjutnya, hasil uji validitas diskriminan menggunakan kriteria Fornell–Larcker pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan konstruk lain. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masing-masing konstruk memiliki kemampuan yang memadai untuk membedakan dirinya dari konstruk lainnya, sehingga validitas diskriminan model telah terpenuhi (Hair et al., 2014).

Tabel 3. Uji Validitas Diskriminan

Konstruk	KPED	KPMDD	PBPD	TPKD
KPED	0.714			
KPMDD	0.381	0.718		
PBPD	0.278	0.437	0.742	
TPKD	0.394	0.465	0.447	0.718

Sumber: Data diolah (2025)

Pada Tabel 4, reliabilitas konstruk terkonfirmasi melalui nilai *Composite Reliability* yang berada di atas 0,80. Nilai *Cronbach's Alpha* untuk sebagian besar variabel juga berada di atas 0,70, sedangkan variabel komitmen pemerintah desa memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,681. Menurut Hair et al. (2014), nilai *Composite Reliability* sebesar 0,70 atau lebih menunjukkan reliabilitas yang memadai, sedangkan nilai antara 0,60–0,70 masih dapat diterima pada penelitian yang bersifat eksploratori. Oleh karena itu, meskipun nilai *Cronbach's Alpha* variabel komitmen pemerintah desa sedikit berada di bawah 0,70, konstruk tersebut tetap dapat diterima karena didukung oleh nilai *Composite Reliability* yang telah memenuhi kriteria reliabilitas.

Tabel 4. Uji Realibitas

Konstruk	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Kompetensi Pendamping Desa (KPED)	0.862	0.807
Komitmen Pemerintah Desa (KPMDD)	0.807	0.681
Pengawasan BPD (PBPD)	0.895	0.863

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (TPKD)	0.863	0.809
---	-------	-------

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil Pengujian Inner Model

Hasil evaluasi model struktural memperlihatkan bahwa semua hipotesis penelitian yang diusulkan, dinyatakan diterima sebagaimana pada Tabel 5. Pertama, kompetensi pendamping desa terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa, ditandai oleh koefisien jalur sebesar 0,243 dengan nilai $p < 0,001$, sehingga H1 dinyatakan terdukung. Kedua, komitmen pemerintah desa juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa, dengan koefisien jalur 0,260 dan nilai $p < 0,001$, sehingga H2 juga terdukung. Ketiga, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa, yang tercermin dari koefisien jalur 0,272 dengan nilai $p < 0,001$, sehingga H3 dinyatakan terdukung. Selain itu, nilai R^2 sebesar 0,351 mencerminkan bahwa variabel independen dalam model dapat menjelaskan 35,1 persen variasi transparansi pengelolaan keuangan desa, sehingga kemampuan prediksi model tergolong cukup baik.

Tabel 5. Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis	Path Coefficients	P-Value	Keterangan
KPED → TPKD	0.243	<0.001	Terdukung
KPMD → TPKD	0.260	<0.001	Terdukung
PBPD → TPKD	0.272	<0.001	Terdukung
$R^2 = 0.351$	Adj. $R^2 = 0.343$	$Q^2 = 0.354$	

Sumber: Data diolah (2025)

Pembahasan

Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa kompetensi pendamping desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa. Hasil ini membuktikan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki pendamping desa, pada aspek pengetahuan, keterampilan teknis, maupun profesionalisme, maka semakin besar perannya dalam mendorong keterbukaan informasi keuangan desa. Dengan kompetensi yang memadai, pendamping desa tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pengarah dan penguat kapasitas aparatur desa agar mampu menyusun, mendokumentasikan, dan menyajikan laporan keuangan secara lebih teratur, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh masyarakat. Artinya, pendamping yang kompeten mampu membantu pemerintah desa menjalankan proses pelaporan secara terbuka, mulai dari perencanaan, pencatatan, hingga pelaporan informasi keuangan kepada publik, sehingga transparansi tidak berhenti pada aspek formalitas, melainkan benar-benar menjadi praktik tata kelola yang baik di tingkat desa.

Temuan ini paralel dengan sejumlah penelitian terdahulu. Purbadharmaja et al. (2023) Menegaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh signifikan terhadap tata kelola keuangan, yang secara substansi berkaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas. Umar et al. (2018) Juga mengutarakan bahwa kompetensi SDM berdampak pada kualitas laporan keuangan, sehingga semakin kompeten pelaksana dan pendamping, semakin baik keluaran pelaporannya. Sejalan dengan itu, Dilla & oryanata (2024) mengindikasikan bahwa kompetensi aparatur dan pendamping berdampak positif terhadap pengelolaan keuangan desa, sementara Purba et al. (2024) menempatkan kompetensi aparatur sebagai salah satu faktor penentu transparansi keuangan publik. Berdasarkan rangkaian temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pendamping desa merupakan faktor penting dalam memperkuat transparansi keuangan desa. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas pendamping desa melalui pelatihan yang terarah, pembaruan pengetahuan regulatif, penguatan keterampilan teknis pelaporan, serta pendampingan berkelanjutan menjadi strategi kunci untuk mendorong pengelolaan keuangan desa yang semakin transparan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen pemerintah desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi keuangan sangat bergantung pada integritas, konsistensi, serta kesungguhan kepala desa dan perangkatnya dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Ketika komitmen tersebut kuat, pemerintah desa tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga aktif memastikan data keuangan disajikan secara lengkap, akurat, dan mudah diakses warga. Keterbukaan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan program, sampai pelaporan dan pertanggungjawaban. Akibatnya, transparansi bukan lagi formalitas, melainkan praktik

yang konsisten dan berkelanjutan, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas publik karena masyarakat memiliki dasar informasi yang cukup untuk mengawasi dan memberi masukan.

Temuan ini konsisten dengan Tresnawati & Rahayu (2023) yang menegaskan bahwa komitmen pimpinan organisasi publik berperan penting untuk mendorong transparansi laporan keuangan. Penelitian Riska et al. (2022) yang menjelaskan bahwa kepemimpinan yang berkomitmen pada prinsip *good governance* menciptakan iklim organisasi yang lebih terbuka. Purnamadewi et al. (2021) yang mengisyaratkan bahwa kepemimpinan berperan penting dalam membangun transparansi organisasi publik. Oleh karena itu, komitmen pemerintah desa dapat dipahami sebagai fondasi moral dan etis sekaligus faktor manajerial yang memastikan keterbukaan dijalankan secara konsisten. Penguatan komitmen melalui keteladanan kepemimpinan, pembiasaan publikasi laporan secara periodik, dan mekanisme evaluasi keterbukaan menjadi strategi penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengawasan BPD terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan BPD, melalui evaluasi rencana anggaran, pemantauan pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian dan penilaian laporan pertanggungjawaban, secara nyata mendorong meningkatnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan desa. Artinya, semakin efektif BPD menjalankan perannya, semakin kecil ruang bagi praktik pengelolaan keuangan yang tertutup, dan semakin kuat dorongan bagi pemerintah desa untuk menyebarkan laporan keuangan dengan jelas, tepat waktu, dan mudah diakses publik. BPD adalah lembaga representasi masyarakat yang mempunyai peran strategis dalam menurunkan asimetri informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi BPD sebagai penghubung yang memastikan informasi mengenai anggaran dan realisasi program tidak hanya berada dalam lingkup internal pemerintah desa, tetapi juga diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan Baskoro (2025) yang menegaskan bahwa BPD ditempatkan sebagai institusi sentral dalam mekanisme *checks and balances* untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola desa yang baik. Hasil tersebut juga konsisten dengan Kusri & Jaya (2024) yang mengungkapkan bahwa pengawasan eksternal merupakan mekanisme penting untuk menekan asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Lebih lanjut, penelitian Basri et al. (2021) menggambarkan bahwa peran BPD berdampak positif dan signifikan terhadap *good governance*, dan Apriliana (2019) yang menegaskan bahwa pengawasan lembaga perwakilan desa meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan publik di tingkat desa. Menariknya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan BPD memiliki koefisien pengaruh paling besar dibandingkan kompetensi pendamping desa dan komitmen pemerintah desa. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa lebih banyak dipengaruhi oleh efektivitas mekanisme pengawasan kelembagaan dibandingkan dengan faktor kapasitas maupun komitmen internal pemerintah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi keuangan tidak hanya bergantung pada kemampuan dan kemauan pemerintah desa untuk menyajikan informasi, tetapi juga pada adanya kontrol eksternal yang mendorong kepatuhan terhadap prinsip transparansi.

Temuan ini memperkuat teori keagenan yang menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah desa sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal rentan terhadap asimetri informasi, sehingga diperlukan mekanisme monitoring yang efektif untuk meminimalkan *moral hazard*. Dalam konteks ini, BPD berperan sebagai representasi masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan untuk mengurangi kesenjangan informasi dan mendorong keterbukaan pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini juga mendukung prinsip *good governance* yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan *checks and balances* sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan. Dominannya pengaruh pengawasan BPD menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya ditentukan oleh kompetensi pendamping desa dan komitmen pemerintah desa, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan kelembagaan yang memastikan pengelolaan keuangan desa berlangsung secara terbuka.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kompetensi pendamping desa, komitmen pemerintah desa, dan pengawasan BPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin kuat ketiga faktor tersebut, semakin tinggi pula tingkat keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan desa. Temuan ini menandakan bahwa transparansi

tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan atau tuntutan administratif, tetapi juga tergantung dari kualitas sumber daya pendukung, komitmen kepemimpinan, dan efektivitas pengawasan kelembagaan di tingkat desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi dapat diwujudkan sebagai praktik tata kelola pemerintahan desa.

Kompetensi pendamping desa terbukti berkontribusi dalam memperkuat praktik transparansi, sehingga peningkatan kapasitas pengetahuan, kemampuan teknis, dan profesionalitas pendamping desa menjadi aspek penting dalam mendorong pemerintah desa untuk menyusun administrasi serta laporan keuangan yang terbuka dan mudah dipahami masyarakat. Komitmen pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam mendorong keterbukaan informasi keuangan desa. Integritas dan konsistensi kepala desa beserta perangkat desa menjadi prasyarat utama agar transparansi tidak berhenti pada aspek formalitas, melainkan dapat tercapai melalui penyampaian informasi keuangan yang jelas, tepat waktu, dan mudah diakses masyarakat. Pengawasan BPD turut terbukti berpengaruh terhadap keterbukaan informasi publik, yang menunjukkan bahwa peran lembaga perwakilan masyarakat ini sangat penting dalam mengurangi asimetri informasi serta memastikan mekanisme *check and balance* berjalan secara efektif di tingkat desa. Upaya meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Donggala memerlukan penguatan kapasitas pendamping desa, peningkatan komitmen dan integritas aparatur pemerintah desa, serta optimalisasi efektivitas pengawasan BPD.

SARAN

Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan transparansi keuangan desa melalui tiga arah utama. Pertama, kapasitas pendamping desa perlu ditingkatkan secara sistematis melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi kompetensi yang menekankan pemahaman regulasi, keterampilan teknis penyusunan dan verifikasi laporan, serta kemampuan komunikasi publik agar informasi keuangan lebih mudah dipahami masyarakat. Kedua, komitmen pemerintah desa perlu diperkuat melalui regulasi internal dan pembentukan budaya organisasi yang akuntabel, termasuk pembiasaan publikasi informasi keuangan secara periodik, penyediaan kanal akses informasi yang jelas, dan keteladanan kepemimpinan agar transparansi berjalan konsisten, bukan sekadar formalitas. Ketiga, kapasitas BPD perlu diperkuat agar pengawasan berjalan independen dan efektif melalui pelatihan analisis anggaran dan dokumen pelaporan, mekanisme evaluasi rutin, serta tindak lanjut hasil pengawasan yang terdokumentasi, sehingga prinsip *check and balance* benar-benar berfungsi dan mengurangi asimetri informasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mencakup Kabupaten Donggala, sehingga penerapan temuan pada wilayah lain perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan perbedaan konteks kelembagaan dan sosial. Penelitian ke depan disarankan memperlebar lingkup geografis sehingga hasil lebih komparatif, menambahkan variabel lain, misalnya pemanfaatan teknologi informasi, budaya organisasi, partisipasi masyarakat, atau sistem pengendalian internal, serta menggunakan pendekatan longitudinal untuk menangkap perubahan dan konsistensi transparansi keuangan desa dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kepada Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi selaku penyandang dana penelitian ini, dengan Nomor kontrak 137/C3/DT.05.00/PL/2025, 870/LL16/AL.04/2025, 013/LPPM/UN-AZLAM/PFR-2/VI/2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2017). Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah: semu atau nyata? *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 12(2), 105–117. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art3>
- Aji, D. U. (2023). *Catat 900 Kasus Korupsi di Tingkat Desa, Begini Wanti-wanti KPK*. Detik.Com. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6736161/catat-900-kasus-korupsi-di-tingkat-desa-begini-wanti-wanti-kpk>.
- Amaliya, R., & Maryono. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 13(1), 122–133.

- <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.624>
- Apriliana, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 109–122. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.18>
- Baskoro, A. (2025). Strengthening Good Village Governance Strategy : Transparency, Accountability, and Inclusive Rural Development. *Bestuurskunde: Journal of Government Studies*, 5(1), 39–50. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.5.1.39-50>
- Basri, Y. M., Azlina, N., & Arfendi, L. Z. (2021). Financial Management, Organizational Commitment and Legislative Role on the Implementation of Good Governance at Village Governments. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 24(01), 109–126. <https://doi.org/10.33312/ijar.517>
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2012). Promoting transparency and accountability through ICTs , social media , and collaborative e-government. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 6(1), 78–91. <https://doi.org/10.1108/17506161211214831>
- Cuadrado-Ballesteros, B., & Bisogno, M. (2023). The relevance of budget transparency for development. *International Review of Administrative Sciences*, 89(1), 239–256. <https://doi.org/10.1177/00208523211027525>
- Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. *Development in Practice*, 17(4–5), 663–671. <https://doi.org/10.1080/09614520701469955>
- Dewi, P. P., Ayu, G., Rencana, K., & Dewi, S. (2021). Pengaruh kompetensi, akuntabilitas dan peran pen- damping desa terhadap pengelolaan dana desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(01), 820–829.
- Diansari, R. E., Musah, A. A., & Binti Othman, J. (2023). Factors affecting village fund management accountability in Indonesia: The moderating role of prosocial behaviour. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2219424>
- Diansari, R. E., Othman, J. B., & Musah, A. A. (2023). Accountability and Perception of Prosocial Behavior in Village Fund Management. *Journal of Governance and Regulation*, 12(1), 124–132. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i1art12>
- Dilla, A. M., & Coryanata, I. (2024). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Pendamping Desa, Kompetensi Aparatur Desa, Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Serta Komitmen Pemerintahan Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 08(01), 1–23.
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. *European Business Review*, 26(2), 106–121. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>
- Halachmi, A., & Greiling, D. (2013). Transparency, E-government, and accountability: Some issues and considerations. *Public Performance and Management Review*, 36(4), 562–584. <https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576360404>
- Hulu, F., & Rahim, R. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Hilina’a Kecamatan Gunungsitoli. *Audit and Accounting Guide*, 4(6), 557–583. <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1096/1096>
- Jatmiko, B., & Setiawan, M. B. (2020). The effect of external pressure, management commitment, and accessibility towards transparency of financial reporting. *Journal Of Accounting and Investment*, 21(1), 114–124.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kusrini, R., & Jaya, F. P. (2024). The Influence of Village Council Oversight on Government Performance through the Village Financial System. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v4i2.14630>
- Lapsley and Ryos. (2015). Making Sense of Government Budgets : An Internal Transparency Perspective. *Qualitative Research in Management Making*, 12(4), 377–394.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(2), 101–121.

- <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006>
- Maharani, A. M. (2018). BPD Empowerment Program in Optimizing Village Financial Implementation (Perspective Law No. 6 of 2014). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(1), 93–108. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils>
- Mukarramah, N. (2024). Apparatus Competence, Internal Control System, Information Technology Utilization and Accountability of Village Fund Allocation Management. *Advances in Applied Accounting Research*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.60079/aaar.v2i1.144>
- Nislandi, N. A., & Munari, M. M. (2023). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Sidoarjo. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 143. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1518>
- Nurhadi, Syamsul, & Nurlailah. (2021). Potret Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Donggala. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 6(2), 221–234.
- Nurlailah, N., & Syamsul, S. (2021). Indeks Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Bagaimana Perkembangannya? *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 8(2), 1–10. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5388>
- Pribadi, K. I., Santoso, S. E. B., Dirgantari, N., & Hartikasari, A. I. (2025). Pengaruh Komitmen Organisasi, Transparansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 39–52. <https://doi.org/10.29103/jak.v13i1.18193>
- Purba, T. C. B. K., Zamzami, & Hardiani. (2024). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 19(2), 2085–1960. www.bpk.go.id
- Purbadharmaja, I. B. P., Setiawan, P. Y., Irwansyah, M. R., & Narmaditya, B. S. (2023). Human Resource Competency, Economic Potential, and Village-Based Enterprises' Productivity: The Mediating Role of Governance. *Asian Journal for Public Opinion Research*, 11(1), 31–53. <https://doi.org/10.15206/ajpor.2023.11.1.31>
- Purnamadewi, N. K. P., Riasning, N. P., & Rupa, I. W. (2021). Pengaruh Komitmen Manajemen, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pada SKPD di Kota Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(1), 41–47. <https://doi.org/10.22225/jraw.2.1.2931.41-47>
- Purnamawati, I. G. A., & Adnyani, N. K. K. S. (2019). Peran Komitmen, Kompetensi, Dan Spiritualitas Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 227–240. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10013>
- Putri, A. M., & Sari, D. P. P. (2024). Apakah Pengelolaan Keuangan Desa Sudah Akuntabel? *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 14(1), 142–152. <https://doi.org/10.37859/jae.v14i1.6329>
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Sekretariat Negara*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Riska, R., Yamin, N. Y., & Nurdin, J. (2022). Determinan Transparansi Pelaporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(1), 77. <https://doi.org/10.24853/jago.3.1.77-86>
- Savitri, E., Diyanto, V., & Herda Nik Abdullah, N. (2023). The Effect of Internal Control Systems, Community Participation, and Village Financial System on the Accountability of Village Fund Management: Prosocial Behavior as Moderation. *Journal for Re Attach Therapy and Developmental Diversities*, 6(9s2), 772–789. <https://jrtd.com>
- Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2021). Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 18(3), 397–418.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at work: Models for superior performance*. Wiley. *Organizational Change*, 18(3), 397–418. <https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2020-0070>
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10–25. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Sriwahyuni, N., Larasati, E., & Suwitri, S. (2020). Leadership Commitment in Transparency

- Management of Public Information in Pemalang District, Indonesia. *Expert Journal of Business and Management*, 8(1), 67–75. <http://business.expertjournals.com>
- Susanti, Basri, Y. M., & Rasuli, M. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pendampingan Desa dan Pemantauan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Desa-Desa di Kabupaten Siak Provinsi Riau). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(2), 254–277.
- Syamsul, Nurhadi, & Nuralilah. (2025). Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Mengungkap Implementasinya di Desa Pombewe. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 15(1), 35–42. <https://doi.org/10.37859/jae.v15i1.7835>
- Syamsul, Nurlailah, & Nurhadi. (2024). Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Investigasi Peran Pendamping Desa dalam Memacu Penerapannya di Desa Bale dan Desa Baliara. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 5(2), 327–342.
- Tresnawati, S., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Komitmen Manajemen terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung Tahun 2021). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 31–40. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2682>
- Umar, H., Usman, S., & Purba, R. B. R. (2018). The influence of internal control and competence of human resources on village fund management and the implications on the quality of village financial reports. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(7), 1526–1531.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. UNDP.